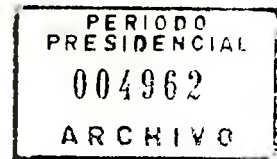


RE  
REGIST  
NR. **93/17962**  
A: **03 SEP 93**  
P.A.A.  R.G.A.   
C.B.E.  M.L.P.   
M.T.O.  E.D.E.C.   
M.Z.C.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



Jakarta, 22 Juli 1993

Yang Mulia;

Seperti dimaklumi, sewaktu Konperensi Tingkat Tinggi ke-10 Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Non Blok di Jakarta September yang lalu, kita bersama sepakat menyerukan digairahkannya kembali suatu dialog yang konstruktif antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang atas dasar baru yakni kemitraan, kepentingan, kemanfaatan dan tanggung jawab bersama. KTT Jakarta itu juga telah mengeluarkan suatu keputusan yang memberi keluwesan kepada Ketua GNB antara lain untuk menyelenggarakan sidang Komite Tetap Tingkat Menteri yang dibentuk untuk meluncurkan kembali dialog Utara-Selatan dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Sidang Komite ini telah berlangsung pada 11-13 Mei 1993 di Indonesia dan hasil-hasilnya telah disampaikan kepada Yang Mulia melalui Perwakilan negara-negara anggota GNB pada PBB di New York.

Kiranya Yang Mulia juga mengetahui bahwa pada kesempatan KTT Jakarta itu, beberapa Kepala Negara/Pemerintahan menyampaikan kepada saya selaku pimpinan sidang pemikiran agar saya selaku Ketua GNB dapat diberi mandat oleh Konperensi untuk mengadakan pembicaraan dengan G-7 dalam rangka upaya meluncurkan kembali dialog Utara-Selatan. Saya beranggapan bahwa dengan cara itu gagasan baik demikian dikhawatirkan dapat menjadi kontra-produktif karena dapat diartikan oleh G-7 sebagai suatu pemaksaan. Lebih-lebih lagi, suatu otorisasi begitu dari seluruh anggota GNB, andaikata tidak berhasil mencapai sasaran, dikhawatirkan akan dapat menimbulkan hubungan kurang serasi atau bahkan perpecahan di antara 108 negara anggota GNB dan 7 negara industri maju.

Berdasarkan hal-hal itu dan juga karena saya menganggap bahwa KTT G-7 di Tokyo, Juli 1993, merupakan kesempatan yang baik, saya telah mengambil prakarsa untuk melakukan pendekatan kepada

Yang Mulia  
TUAN PATRICIO AYLWIN AZOCAR  
Presiden Republik Chile  
SANTIAGO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

anggota-anggota G-7 pada berbagai tingkat agar Ketua GNB dapat menyampaikan kepada para pemimpin G-7 secara bersamaan (format 7+1) pandangan dan saran-saran GNB seperti dihasilkan oleh KTT Jakarta dengan penekanan pada ajakan berdialog dengan negara-negara maju. Dalam hubungan ini, prakarsa saya itu ternyata telah mendapat dukungan secara spontan dari sidang Komite Tetap Tingkat Menteri untuk Kerja Sama Ekonomi itu.

Meskipun telah dilakukan upaya secara gencar, namun format prosedural 7+1 itu tidak memperoleh konsensus di antara negara-negara G-7. Yang menggembirakan, sebagai hasil konsultasi dan pendekatan terhadap G-7 itu dengan dibantu oleh Jepang sebagai negara tuan rumah dan Ketua G-7, adalah timbulnya pengertian pada G-7 bahwa dialog antara G-7 dan GNB sudah waktunya terjadi. Akhirnya dari pihak G-7 diajukan suatu format alternatif yakni Pertemuan Ketua G-7 dengan Ketua GNB (1+1). Setelah dinegosiasikan lebih lanjut, akhirnya telah saya putuskan menerima baik format 1+1 itu, setelah dicapai pengertian bersama dengan G-7 bahwa: 1) Dengan mandat anggota-anggota G-7 lainnya, PM Miyazawa selaku Ketua G-7 mengundang dan bertemu dengan Ketua GNB; 2) Ketua G-7 akan meneruskan hal-hal yang telah disampaikan oleh Ketua GNB kepada sidang G-7; 3) Hal-hal yang telah disampaikan itu dibicarakan dan dibahas oleh KTT G-7 di bawah mata acara yang menyangkut masalah negara berkembang; 4) Pembahasan mengenai hal-hal yang telah disampaikan Ketua GNB di KTT G-7 itu akan dicerminkan dalam dokumen KTT Tokyo; dan 5) Ketua G-7 akan mengirim utusan khusus guna menyampaikan kepada Ketua GNB hasil pembahasan KTT G-7 mengenai apa yang telah disampaikan Ketua GNB termaksud.

Sewaktu pembicaraan dengan PM Miyazawa selaku Ketua G-7 di Tokyo pada tanggal 5 Juli 1993 itu, saya antara lain telah menjelaskan langkah-langkah yang diambil GNB dalam rangka kerja sama Selatan-Selatan yang diantaranya meliputi bidang-bidang pengamanan pangan, kependudukan dan keluarga berencana, kerja sama teknik di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Indonesia sendiri sebagai Ketua GNB telah melaksanakan kerja sama Selatan-Selatan melalui sistem magang. Berdasarkan pengalaman, ternyata yang seringkali menghambat pelaksanaan kerja sama ini adalah keterbatasan dana. Karena itu, diharapkan negara-negara maju dapat membantu mengatasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3

keterbatasan dana tersebut melalui pengaturan tiga pihak (*tripartite financing arrangements*).

Selanjutnya, saya telah mengemukakan masalah beban hutang luar negeri yang dirasakan oleh hampir semua negara anggota GNB sehingga mengganggu pelaksanaan pembangunan mereka. Ada tiga kategori negara-negara penghutang; yaitu: (1) yang masih mampu membayar kembali hutangnya namun kelancaran pembangunan yang bersangkutan terganggu olehnya; (2) yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya membayar hutang; dan (3) yang sama sekali tidak mampu membayar kembali (18 dari 47 negara LDC's). Karena masalah beban hutang ini juga menyangkut kepentingan negara-negara maju maka diperlukan kerja sama dalam memecahkannya. Untuk itu, perlu dipertimbangkan berbagai langkah antara lain persyaratan yang lebih lunak atau bunga yang sangat ringan, jangka waktu pembayaran kembali dan *grace period* lebih diperpanjang. Selain itu, misalnya bagi negara-negara yang termasuk dalam kategori (3), di samping penghapusan hutang diberikan pula bantuan baru yang bersyarat lunak atau apabila mungkin bantuan hibah sehingga memungkinkan mereka dapat membangun kembali.

Saya juga menyerukan agar negara-negara maju membuka pasar mereka bagi komoditi negara-negara berkembang dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan. Dalam hubungan ini, saya menyatakan harapan bahwa perundingan Putaran Uruguay dapat segera diselesaikan dengan hasil yang seimbang, adil dan memuaskan semua pihak, termasuk negara-negara berkembang.

Guna mencapai hasil seperti diharapkan, penting sekali dialog konstruktif antara negara-negara maju dan berkembang. Untuk melaksanakan dialog itu, tidak diperlukan lembaga baru, tetapi cukup dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah ada dalam sistem PBB.

Guna membantu untuk lebih mendalami dan memerinci presentasi saya itu, kepada Ketua G-7 dan melalui Ketua G-7 kepada pemimpin-pemimpin G-7 lainnya, saya telah menyampaikan empat dokumen masing-masing (1) Ajakan untuk dialog: Sebuah pesan untuk para Pemimpin Kelompok 7 (*An invitation to Dialogue: A Message to the Leaders of the Group of Seven*); (2) Memorandum mengenai langkah-langkah mendesak tentang hutang negara-negara berkembang secara bilateral, multilateral dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

4

komersial (*Memorandum on Urgent Actions on Bilateral, Multilateral and Commercial Debt of Developing Countries*); (3) Pesan Jakarta dan Dokumen Akhir KTT X Kepala-kepala Negara atau Pemerintahan Negara-negara Non Blok (*Jakarta Message and Final Documents of Tenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries*); dan (4) Dokumen Akhir Komite Tetap Tingkat Menteri Non Blok untuk Kerja Sama Ekonomi (*Final Document of Non-Aligned Standing Ministerial Committee for Economic Cooperation*). (Dua dokumen (1) dan (2) terlampir).

Menanggapi presentasi saya itu, PM Miyazawa berjanji akan menyampaikan pesan-pesan Ketua GNB itu di bawah mata acara yang membahas negara-negara berkembang dan memberitahukan bahwa akan mengutus Wakil Menlu Koichiro Matsuura ke Jakarta untuk menyampaikan hasil pembahasannya kepada saya selaku Ketua GNB.

Sesuai dengan kesepakatan, pada tanggal 15 Juli 1993, saya telah menerima Wakil Menlu Matsuura sebagai Utusan Khusus PM Miyazawa selaku Ketua G-7 guna menyampaikan surat dan pesan lisan beliau. PM Miyazawa selaku Ketua G-7 menjelaskan bahwa dalam pembahasan masalah-masalah negara-negara berkembang beliau telah menyampaikan secara rinci isi dari presentasi "Ajakan untuk Dialog" dan menekankan betapa pentingnya masalah hutang. Selanjutnya, dinyatakan bahwa negara-negara maju harus memberikan tanggapan secara positif terhadap ajakan dialog yang konstruktif dari negara-negara berkembang. Menurut PM Miyazawa, negara-negara G-7 ternyata menilai bahwa pesan yang telah saya sampaikan itu sangat bermanfaat dan menyambut baik inisiatif untuk menegakkan kemitraan dan dialog yang konstruktif sebagaimana tercermin dalam Deklarasi Ekonomi G-7. Dalam pada itu, dalam keterangannya kepada pers menjelang berakhirnya KTT Tokyo, PM Miyazawa telah menyampaikan penilaian G-7 yang memberi arti penting pertemuannya dengan Ketua GNB dan penyampaian pesan GNB. Pertemuan antara Ketua KTT G-7 dan Ketua GNB yang bersejarah itu dinilai merupakan satu langkah besar menuju terciptanya hubungan kerja sama yang baru antara negara-negara maju dan berkembang. Untuk itu, PM Miyazawa menyampaikan ucapan selamat atas inisiatif yang telah diambil ke arah hubungan kerja sama demikian.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

5

Dari hasil KTT Tokyo, dalam Deklarasi Ekonomi mengenai negara-negara berkembang, para Kepala Negara/Pemerintahan G-7 telah menyambut baik prakarsa yang diambil oleh negara-negara berkembang untuk membentuk suatu kemitraan dan dialog yang konstruktif mengenai persoalan-persoalan yang menjadi kepentingan bersama. Sementara itu, dalam upaya mendorong negara-negara berkembang untuk menciptakan suatu landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, G-7 akan menempuh suatu pendekatan yang menyeluruh yang meliputi tidak hanya bantuan tetapi juga perdagangan, investasi dan strategi hutang, di samping pendekatan berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prestasi setiap negara pada tahapan pembangunannya. Dalam pada itu, baik pertemuan Ketua GNB dengan Ketua G-7 maupun pembahasannya di KTT G-7 secara terinci telah disampaikan oleh Ketua G-7 dalam pernyataan persnya. Dikatakan bahwa pertemuan tersebut sungguh bermanfaat dan tepat waktunya. Juga dikatakan bahwa paragraf 12, 13 dan 14 dari Deklarasi Ekonomi secara tepat telah mencerminkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap pesan yang telah disampaikan oleh Ketua GNB dan ini merupakan bukti kemanfaatan kunjungan Ketua GNB ke Tokyo. Dijelaskan bahwa semua anggota G-7 telah menyatakan persetujuan dan penghargaan mereka terhadap kemanfaatan pertemuan itu.

Pada kesempatan kunjungan di Tokyo, saya juga telah bertemu dengan Presiden AS, Bill Clinton. Walaupun pertemuan itu pada dasarnya bersifat bilateral, tetapi telah disinggung juga mengenai GNB. Kendati pertemuan berlangsung sebelum KTT G-7, atas persetujuan kami, Ketua G-7 telah meneruskan pesan-pesan saya dan dokumen-dokumen yang disampaikan Ketua GNB itu kepada Presiden Clinton. Pada kesempatan pertemuan itu, Presiden Clinton menyatakan menaruh arti penting kerja sama antara AS dan negara-negara GNB. Presiden Clinton memberikan tanggapan positif atas pemikiran GNB mengenai penyelesaian masalah hutang terutama beban hutang negara-negara yang paling terbelakang (LDC) di Afrika sebelah selatan Sahara dan di Pasifik dan secara khusus mengungkapkan maksud Pemerintah AS untuk mengambil kebijakan dalam mengurangi hutang negara-negara itu dalam waktu dekat.

Menurut pendapat kami, secara keseluruhan misi selaku Ketua GNB yang saya emban dengan kunjungan ke Tokyo itu telah mencapai hasil yang cukup memuaskan. Tanggapan positif G-7 terhadap ajakan untuk dialog,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

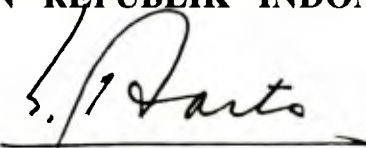
6

kesediaan untuk meninjau kembali strategi penyelesaian hutang negara berkembang dari Paris Club, dan dalam hubungan ini niat Presiden Bill Clinton untuk mengeluarkan kebijaksanaan baru untuk mengurangi beban hutang dari LDC's serta perlunya Putaran Uruguay diselesaikan secara seimbang pada akhir tahun 1993 sungguh merupakan titik tolak untuk kita tindaklanjuti bersama-sama. Juga mengenai kerja sama Selatan-Selatan yang kita sudah bertekad untuk menggalakkannya di antara negara-negara Non Blok dan negara berkembang pada umumnya, walaupun tidak tertera dalam deklarasi ekonomi, menurut PM Miyazawa, pandangan-pandangan GNB telah disampaikan kepada sidang G-7 dan tanggapan mereka cukup baik.

Penerimaan kami atas format prosedural 1+1 dengan beberapa pengertian bersama seperti tersebut di atas kiranya telah lebih memperkuat garis konstruktif dan kooperatif GNB yang telah ditetapkan oleh kita bersama dalam KTT ke-10 di Jakarta.

Terimalah Yang Mulia, penghargaan saya yang setinggi-tingginya.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

  
**S O E H A R T O**

RI  
NR. **93/19562**  
A: 2 4 50  
P.A.A.  R.C.F.   
C.B.E.  M.L.F.   
M.T.O.  EDEC   
M.Z.C.

COPIA AUTÉNTICA

I-600/93

TRADUCCIÓN NO OFICIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
INDONESIA

Yakarta, a 22 de julio de 1993

Su Excelencia:

Como todos sabemos, la Décima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados, celebrada en Yakarta en septiembre del año pasado, fue convocada, entre otras cosas, para reactivar un diálogo constructivo entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Se enfatizó que este diálogo debería basarse en un nuevo principio: el principio de sociedad, de mancomunidad de intereses y beneficios y de responsabilidad compartida. Los líderes del MNA asimismo concordaron en otorgar a su Presidente la flexibilidad necesaria para que pudiera convocar a una reunión del

Su Excelencia

Sr. PATRICIO AYLWIN AZÓCAR

Presidente de la República de Chile

SANTIAGO

-- // --

Comité Ministerial Permanente a fin de reiniciar el diálogo Norte-Sur y consolidar la Cooperación Sur-Sur. Como sabemos, este comité fue convocado en Bali, Indonesia, entre el 11 y el 13 de mayo de 1993, y el resultado ha sido transmitido a Su Excelencia a través del Representante Permanente ante las NU en Nueva York.

Su Excelencia recordará que durante la Cumbre de Yakarta, varios Jefes de Estado me comunicaron, en mi calidad de Presidente de la Conferencia, que esta última había conferido un mandato explícito al Presidente del Movimiento en el sentido de sostener un diálogo con el Grupo de los Siete Países Más Industrializados con el propósito de revitalizar el diálogo Norte-Sur. En esa oportunidad, sostuve que si bien compartía plenamente la idea de iniciar un diálogo con el G-7, de someterla a la resolución o decisión de la Cumbre, tal idea bien intencionada podría resultar contraproducente ya que el G-7 podría interpretarla como una imposición. Asimismo, consideré que si dicha iniciativa que emanaba de la totalidad de los miembros del MNA no lograba cumplir su objetivo, el resultado podría ser una desunión o incluso una división entre el MNA y los miembros del G-7.

No obstante, como yo estimaba que la Cumbre de Tokio del G-7 efectuada en julio de 1993 podría constituir una excelente oportunidad para iniciar el proceso de diálogo entre el MNA y el G-7, en ese entonces, en mi

-- // --



-- // --

calidad de Presidente del MNA, tomé la iniciativa de abordar separadamente a los miembros del G-7 en diferentes niveles con el fin de proponer una reunión en la cual el Presidente del MNA presentara la nueva directriz y enfoques del Movimiento adoptados en la Cumbre del MNA de Yakarta a todos los líderes del G-7 (format 7+1). En este punto, cabe destacar que mi iniciativa logró el apoyo total y espontáneo del Comité Ministerial Permanente en Balí para la Cooperación Económica.

A pesar de nuestros mejores esfuerzos, era evidente que los miembros del G-7 no lograron llegar a un consenso sobre el formato propuesto de 7+1. Sin embargo, resultó alentador que, como producto de las consultas y enfoques y con el apoyo activo de Japón, el país anfitrión, y del Presidente del G-7, hubiera un mayor entendimiento de parte de los países del G-7 sobre la necesidad de tener un diálogo entre el G-7 y el MNA. Finalmente, el G-7 propuso un formato alternativo de 1+1, en el que sólo el Presidente del G-7 y el Presidente del MNA se reunieran en representación de sus respectivos grupos de países. Luego de nuevas negociaciones, decidí aceptar el formato propuesto de 1+1 en el claro entendimiento que:

- a) Con el respaldo de los líderes del G-7, el Primer Ministro Miyazawa, como Presidente del G-7 me extendería una invitación en mi calidad de Presidente del MNA para visitar Tokio y entrevistarme con él en

-- // --

-- // --

su calidad de Presidente del G-7;

- b) El Presidente del G-7 presentaría ante la Cumbre del G-7 todos los puntos planteados por el Presidente del MNA;
- c) La Cumbre del G-7 abordaría los puntos planteados por el MNA cuando se llevara a cabo el debate sobre el tema de los países en desarrollo;
- d) La Cumbre del G-7 consignaría los debates en los documentos pertinentes de la Cumbre del G-7; y
- e) El Presidente del G-7 designaría a un enviado para comunicar al Presidente del MNA el resultado de los debates y la declaración del G-7 respecto de los asuntos del MNA.

Con ocasión de mi entrevista con el Primer Ministro Miyazawa en su calidad de Presidente del G-7, efectuada en Tokio el 5 de julio de 1993, expliqué, entre otras cosas, todos los pasos que siguió el MNA para fortalecer la cooperación Sur-Sur, específicamente en los ámbitos de la seguridad de los alimentos, la población y la planificación familiar, cooperación técnica en materia de salud, educación y otras. Indonesia, por cuenta propia, había iniciado diversos programas de aprendizaje dentro del marco de la cooperación Sur-Sur. El mayor

-- // --

-- // --

obstáculo encontrado en este esfuerzo surgió principalmente de la falta de fondos. En consecuencia, propuse que los países desarrollados proporcionaran asistencia a este respecto dentro de acuerdos de financiamiento tripartitos.

Asimismo, planteé el problema del peso de la deuda externa, que ha afectado a casi la totalidad de los miembros del MNA y ha obstaculizado su avance hacia el desarrollo. Para estos efectos, los países esclavos de la deuda fueron clasificados en: a) aquellos que están en condiciones de amortizar sus deudas pero a costa del desarrollo; b) aquellos que enfrentan problemas para cumplir sus obligaciones de deuda; y c) quienes definitivamente no están en condiciones de amortizar su deuda (18 de un total de 47 países menos desarrollados). Hice hincapié en que como el problema de la deuda afecta también los intereses de los países desarrollados, su cooperación es necesaria. En consecuencia, se deberían considerar medidas tales como el otorgamiento de plazos más flexibles o tasas de interés más bajas, o un período de amortización y de gracia más prolongado. Para aquellos países que se encuentran en la categoría (c), la cancelación de la deuda se debe considerar en combinación con el otorgamiento de créditos en dinero fresco o - idealmente - subsidios que les permitan desarrollar sus economías.

-- // --

-- // --

Igualmente, propuse que los países desarrollados abran sus mercados a los productos básicos de países en desarrollo como una forma de apoyarlos en sus esfuerzos por lograr el desarrollo. A este respecto, expresé la esperanza de que las negociaciones de la Ronda Uruguay pudieran concluirse sin demoras injustificadas, de manera equilibrada e imparcial, que resulte satisfactoria para todas las partes interesadas, incluidos los países en desarrollo.

A fin de lograr los resultados deseados, es imperioso buscar un diálogo constructivo entre los países desarrollados y en desarrollo. Para emprender este diálogo, no es necesario crear nuevas instituciones, basta con utilizar las existentes, tales como las de las Naciones Unidas.

En apoyo a mi presentación, y como una forma de proporcionar mayores detalles, remití cuatro documentos al Presidente del G-7, quien posteriormente envió dichos documentos a los demás Jefes de Estado del G-7. Tales documentos son los siguientes: (a) Invitación al Diálogo: Mensaje a los Líderes del Grupo de los Siete; b) Memorándum sobre Medidas Urgentes relativas a la Deuda Bilateral, Multilateral y Comercial de los Países en Desarrollo; c) El Mensaje de Yakarta y los Documentos Finales de la Décima Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países No Alineados; y d) el Documento



-- // --

-- // --

Final de la Reunión del Comité Ministerial Permanente de No Alineados para Cooperación Económica. (Se adjuntan los documentos a y b).

En respuesta a mi presentación, el Primer Ministro Miyazawa se comprometió a transmitir los mensajes del Presidente del MNA a los demás líderes del G-7 cuando analizaran el tema de los países en desarrollo. El Primer Ministro Miyazawa prometió, asimismo, designar al Viceministro de Relaciones Exteriores, Koichiro Matsuura, como su enviado especial para que se entrevistara conmigo como Presidente del MNA y me comunicara el resultado de las conversaciones del G-7 con respecto a esos mensajes.

Según se acordó, el 15 de julio de 1993, recibí al Viceministro de Relaciones Exteriores, Sr. Matsuura, quien portaba una carta y mensajes verbales del Primer Ministro Miyazawa. El Primer Ministro Miyazawa, en su calidad de Presidente del G-7, había señalado que durante las conversaciones sobre el tema de los países en desarrollo se había realizado una presentación detallada de la "Invitación al Diálogo" y, del tema más importante, cual es la carga de la deuda. Asimismo, exhortó a los demás líderes del G-7 a que respondieran positivamente a la invitación de los países en desarrollo a sostener un diálogo constructivo. Según el Primer Ministro Miyazawa, los miembros del G-7 respondieron positivamente a la invitación y consideraron que la idea era útil. Más

-- // --



-- // --

tarde, esto se vio reflejado en la Declaración Económica del G-7. También cabe señalar que durante la conferencia de prensa celebrada al cierre de la Cumbre del G-7, el Primer Ministro Miyazawa señaló que el G-7 valoraba la reunión que había sostenido con el Presidente del MNA y agradecía los mensajes del MNA. Se consideró que esta reunión tenía una importancia histórica y que constituía un paso significativo hacia el establecimiento de una nueva cooperación entre los países desarrollados y en desarrollo. El Primer Ministro Miyazawa expresó sus felicitaciones por la iniciativa adoptada a este respecto.

En la Declaración Económica de la Cumbre de Tokio, en particular sobre el tema de los países en desarrollo, los líderes del G-7 acogieron la iniciativa adoptada por los países en desarrollo de impulsar un diálogo constructivo sobre temas de interés común y de formar una sociedad para el desarrollo. Se señaló que a fin de apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por lograr un desarrollo sustentable, el G-7 adoptaría un enfoque integral que abarcara no sólo la ayuda sino también el comercio, las inversiones y la estrategia de la deuda, y un enfoque diferenciado acorde con las necesidades y etapas de desarrollo de cada país. Durante la conferencia de prensa ofrecida por el Presidente del G-7, se destacó la reunión entre el Presidente del MNA y el Presidente del G-7, así como las deliberaciones del G-7 respecto de los mensajes del MNA. Se señaló que la

-- // --

-- // --

entrevista fue considerada oportuna y conveniente, y que los párrafos 12, 13 y 14 de la Declaración Económica reflejaban correctamente los mensajes del MNA, que dieron fe de lo fructífero de la visita a Tokio del Presidente del MNA. Se señaló que todos los líderes del G-7 agradecieron y concordaron con la conveniencia de la Entrevista de Tokio entre los dos Presidentes.

Durante mi visita a Tokio, tuve también la oportunidad de entrevistarme con el Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Si bien la entrevista tuvo un carácter bilateral, aproveché además la oportunidad de analizar los mensajes del MNA. Como la entrevista se efectuó antes de la Cumbre del G-7, con mi consentimiento en calidad de Presidente del MNA, los mensajes y los documentos del MNA fueron presentados al Presidente Clinton antes que a los demás líderes del G-7. Durante la conversación, el Presidente Clinton destacó la importancia de la cooperación entre Estados Unidos y los países del MNA. El Presidente Clinton acogió favorablemente las ideas del MNA con respecto al problema de la deuda, en particular de los Países Menos Desarrollados en Africa, Sur del Sahara y el Pacífico, y señaló, al mismo tiempo, que EE.UU. pretendía tomar medidas inmediatas para reducir la deuda de dichos países.

En mi humilde opinión, mi visita como Presidente del MNA a Tokio cumplió sus propósitos. La positiva

-- // --

-- // --

respuesta del G-7 a la invitación al diálogo del MNA, su disposición a modificar la estrategia para aliviar los problemas de la deuda de los países en desarrollo a través del Club de París, su intención de presionar para la conclusión de las negociaciones de la Ronda Uruguay antes del término del año 1993, y la iniciativa del Presidente Bill Clinton para reducir la deuda de los Países Menos Desarrollados, constituyen pasos que deben ser supervisados conjuntamente. En lo que respecta a la cooperación Sur-Sur, que los miembros del MNA habíamos decidido impulsar, según el Primer Ministro Miyazawa, si bien no se mencionó específicamente en la Declaración Económica del G-7, la respuesta de la Cumbre del G-7 en ese sentido fue positiva. Mi aceptación, en mi calidad de Presidente del MNA, del formato propuesto 1+1, combinado con los puntos de entendimiento mutuo entre el G-7 el MNA mencionados precedentemente, ha consolidado el enfoque constructivo y de cooperación del MNA que todos acordamos en la Décima Cumbre de Yakarta.

Su Excelencia, sírvase aceptar las seguridades de mi más alta consideración.

Presidente de la República de Indonesia

(Fdo.): SOEHARTO

SANTIAGO DE CHILE, a 16 de septiembre de 1993.



LA TRADUCTORA OFICIAL